

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Taliban merupakan sebuah organisasi militan Islam yang lahir dari sebuah dinamika politik panjang yang terjadi di Afghanistan di akhir tahun 1994, tepatnya disaat kepemimpinan Burhannudin Rabbani dari Suku Tajik yang dianggap bagi beberapa suku di sana tidak kompeten, korupsi, . Perang antar suku yang berbeda aliran keislaman di daratan Afghan, invasi Uni Soviet sejak 1979, campur tangan CIA dan AS, serta Great Game yang menjadikan minyak bumi sebagai bahan negosiasi dengan berbagai negara Eropa dan bahkan Argentina, telah melahirkan sebuah organisasi militan yang tidak sungkan untuk melawan siapa saja yang tidak mengindahkan nilai keislaman ekstrim yang mereka yakini. Taliban, yang berasal dari kelompok etnis mayoritas Pashtun yang berjumlah sekitar 40 persen dari 20 juta penduduk Afghanistan, dengan Taliban sendiri berasal dari kata Thalib yang berarti santri yang mencari ilmu atau menuntut ilmu, berbeda dengan mullah yang berarti memberi ilmu. Dengan demikian, kata Taliban yang merupakan bentuk jamak dari ‘Thalib’, memberikan jarak antara dirinya dan partai politik Mujahiddin, sekaligus memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa mereka merupakan sebuah gerakan yang berupaya membersihkan masyarakat dari para partai politik yang mencoba merebut kekuasaan (Ahmed, 2010, hal. 45).

Dengan penarikan Soviet pada tahun 1989 diikuti perjuangan panjang melawan rezim Presiden Najibullah sampai ia digulingkan pada tahun 1992 dan Mujahidin merebut Kabul. Sebagian besar perang saudara Afganistan berikutnya ditentukan oleh fakta bahwa Kabul jatuh, bukan ke pihak Pashtun yang bersenjata lengkap dan bertengkar yang berbasis di Peshawar, tetapi ke pasukan Tajik Burhanuddin Rabbani yang lebih terorganisir dan lebih bersatu dan komandan militernya Ahmad Shah. Pukulan psikologis yang menghancurkan karena untuk pertama kalinya dalam 300 tahun orang Pashtun kehilangan kendali atas ibu kota. Perang saudara internal segera

dimulai ketika Hikmetyar berusaha mengumpulkan orang-orang Pashtun dan mengepung Kabul, menembaknya tanpa ampun (Ahmed, 2010, hal. 43). Sejalan dengan hal tersebut, Taliban diinisiasi sejak 1992-1994, sebagai kelompok perlawanan Islam karena Burhanuddin Rabanni dianggap tidak kompeten, korupsi, dan tidak mensejahterakan rakyat disana. Muhammad Omar dipilih sebagai pemimpin Taliban dengan orang-orang yang berkumpul di sekitar Omar adalah anak-anak jihad tetapi sangat kecewa dengan faksionalisme dan kegiatan kriminal dari kepemimpinan Mujahiddin yang dulu diidealkan. Mereka melihat diri mereka sebagai pembersih dan pemurni perang gerilya yang tersesat, sistem sosial yang salah dan cara hidup Islami yang telah dikompromikan oleh korupsi dan eksek. Banyak dari mereka lahir di kamp-kamp pengungsi Pakistan, di didik di madrasah Pakistan dan telah mempelajari keterampilan bertarung mereka dari partai-partai Mujahidin yang berbasis di Pakistan. Beberapa Taliban mengatakan Omar dipilih sebagai pemimpin mereka bukan karena kemampuan politik atau militernya, tetapi karena kesalehan dan keyakinannya yang teguh pada Islam.

Yang lain mengatakan dia dipilih oleh Tuhan. Peran serta dukungan dari Madrasah, merupakan langkah yang strategis bagi berbagai pihak yang ingin mencoba untuk merebut panggung politik di Afghanistan. Hal tersebut dilandaskan pada penilaian masyarakat Afghanistan, dimana Madrasah tidak hanya dilihat sebagai institusi pendidikan, namun mereka juga dilihat sebagai medium bagi perkembangan dan inovasi sosial politik disana. Disisi lain, Madrasah juga turut berperan signifikan pada pembentukan identitas sosial dan masyarakat di Afghanistan. Jika melacak pada kedalaman historis, ditemukan bahwa peran Madrasah dalam konsolidasi politik di Afghanistan terlihat sejak invasi Soviet hingga periode rezim Taliban di Afghanistan pada tahun 1996. Taliban yang menguasai Kabul pada tahun 1996 tidak hanya membuka babak baru terhadap dinamika sejarah di Afghanistan, disisi lain mereka juga mempunyai peran dalam mengakhiri perselisihan dan persetujuan berbagai faksi Mujahidin ketika perumusan agenda politik terjadi (Ashghor, 2021). Akhirnya pada tahun 1996, Rezim Taliban resmi berdiri

dengan nama Emirat Islam Afghanistan dengan menguasai lebih dari 90% wilayah Afghanistan pada tahun 1998 (Rahmatullah & Hamidah, 2021).

Sejak berakhirnya Perang Dingin tidak ada gerakan politik di dunia Islam yang menarik perhatian sebanyak Taliban di Afghanistan. Bagi sebagian warga Afghanistan, Taliban menciptakan harapan bahwa sebuah gerakan yang dipimpin oleh mahasiswa Islam sederhana dengan agenda membawa perdamaian ke negara Afghanistan mungkin berhasil pada akhirnya menyingkirkan faksi-faksi panglima perang yang telah menghancurkan kehidupan masyarakat sejak rezim komunis di Kabul digulingkan pada April 1992. Yang lain khawatir bahwa gerakan Taliban akan segera merosot menjadi satu faksi panglima perang lagi, bertekad untuk memaksakan kekuasaan despotik atas rakyat Afghanistan yang malang.

Namun Taliban secara tidak sengaja telah menjadikan jalan terbuka untuk radikalisme Islam di Afghanistan. Iran, Turki, India, Rusia dan empat dari lima Republik Asia Tengah yakni Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan dan Tajikistan telah mendukung Aliansi Utara anti Taliban dengan senjata dan uang untuk mencoba dan menghentikan kemajuan Taliban. Disisi lain, Pakistan dan Arab Saudi telah mendukung Taliban. Uni Soviet menggelontorkan sekitar US\$5 miliar per tahun ke Afghanistan untuk menaklukkan Mujahidin atau total US\$45 miliar dan mereka kalah. AS memberikan sekitar empat hingga lima miliar dolar antara tahun 1980 dan 1992 dalam bentuk bantuan kepada Mujahiddin. Dana AS diimbangi oleh Arab Saudi dan bersama-sama dengan dukungan dari negara-negara Eropa dan Islam lainnya, Mujahiddin menerima total lebih dari US\$10 miliar (Ahmed, 2010, hal. 40).

Taliban telah menerapkan interpretasi ekstrim dari Syariah atau hukum Islam yang mengejutkan banyak orang Afghanistan dan dunia Muslim. Taliban telah menutup semua sekolah perempuan dan perempuan jarang diizinkan keluar rumah, bahkan untuk berbelanja. Taliban telah melarang segala jenis hiburan termasuk musik, TV, video, kartu, layang-layang dan sebagian besar olahraga dan permainan. Fundamentalisme Islam Taliban begitu ekstrim sehingga tampaknya merendahkan pesan Islam tentang

perdamaian dan toleransi dan kapasitasnya untuk hidup dengan kelompok agama dan etnis lain. Mereka akan mengilhami bentuk fundamentalisme ekstremis baru di seluruh Pakistan dan Asia Tengah, yang menolak untuk berkompromi dengan nilai-nilai Islam tradisional, struktur sosial atau sistem negara yang ada (Ahmed, 2010, hal. 23) Misalnya di sebuah desa dekat Kabul, seorang wanita dilempari batu sampai mati oleh kerumunan orang setelah dijatuhi hukuman karena mencoba melarikan diri dari Afghanistan dengan seorang pria yang bukan kerabat darahnya. Amputasi salah satu tangan atau satu kaki atau keduanya adalah hukuman umum Taliban bagi siapa pun yang tertangkap mencuri. Ketika mereka merebut Kabul pada bulan September 1996, untuk awalnya disambut sebagai pembebas, banyak Kabulis dan dunia berpaling dengan jijik setelah Taliban menyiksa dan kemudian secara terbuka menggantung mantan Presiden Najibullah, mantan orang kuat komunis yang selama empat tahun tinggal di sebuah Kompleks PBB di bawah perlindungan PBB (Ahmed, 2010, hal. 26).

Penafsiran Taliban tentang Islam, jihad, dan transformasi sosial adalah sebuah anomali di Afghanistan karena kebangkitan gerakan itu tidak menggemakan tren Islamis terkemuka yang muncul melalui perang anti-Soviet. Taliban bukanlah Islamis radikal yang diilhami oleh Ikhwan, atau Sufi mistik, atau tradisionalis. Pada tahun 1998, kelompok Taliban Pakistan melarang TV dan video di kota-kota di sepanjang sabuk Pashtun, memberlakukan hukuman Syariah seperti rajam dan amputasi yang bertentangan dengan sistem hukum, membunuh Syiah Pakistan dan memaksa orang, terutama wanita untuk beradaptasi dengan aturan berpakaian Taliban dan jalan hidup. Dukungan Pakistan untuk Taliban dengan demikian kembali menghantui negara itu sendiri, bahkan ketika para pemimpin Pakistan tampaknya tidak menyadari tantangan tersebut dan terus mendukung Taliban. Taliban dan pendukung mereka menghadirkan dunia Muslim dan Barat dengan gaya baru ekstremisme Islam, yang menolak semua akomodasi dengan moderasi Muslim dan Barat. Penolakan Taliban untuk berkompromi dengan badan-badan kemanusiaan PBB atau negara-negara donor asing atau untuk mengkompromikan prinsip-prinsip mereka dengan imbalan pengakuan

internasional dan penolakan mereka terhadap semua elit penguasa Muslim sebagai korup, telah mengobarkan perdebatan di dunia Muslim dan menginspirasi generasi muda militan Islam

Negara-negara Barat, melihat bahwasannya Taliban telah melanggar prinsip Hak Asasi Manusia ketika Taliban menguasai Kandahar, Kerat, Kabul, Jalabad, serta berbagai wilayah lain di Afghanistan. Hal tersebut berkonsekuensi logis pada rezim Taliban yang hanya diakui oleh beberapa negara saja, misalnya seperti Arab Saudi, Pakistan, dan Uni Emirat Arab. Ketika Amerika Serikat meminta Taliban menyerahkan Osama Bin Laden untuk diekstradisi tahun 2001, Taliban menolak mentah-mentah keinginan negara adikuasa tersebut. Akhirnya, Amerika Serikat secara paksa menggulingkan rezim Taliban dalam Operation Enduring Freedom bersama dengan NATO (Rahmatullah & Hamidah , 2021).

Taliban tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bangkit kembali seja kejadian tersebut, di tahun 2007 Taliban kembali melancarkan pelemparan bom, menggunakan penculikan berbagai turis, bom bunuh diri, di tahun 2008, hingga pada 2009 silam. Di tahun-tahun selanjutnya yakni 2010 dan 2011, Taliban melakukan baku tembak dengan pasukan internasional, serta mempercanggih persenjataan mereka dimana hal tersebut dilakukan untuk menyerang sejumlah pangkalan asing dan kedutaan besar. Barangkali, tahun 2012 dan 2013 adalah tahun-tahun dimana perang panas antara Taliban dan Amerika Serikat paling panas. Peningkatan serangan Taliban ke Amerika Serikat, direspon oleh negara Paman Sam tersebut dengan melibatkan pasukan militer AS ke Pemerintahan Afghanistan sebagai bentuk dukungan dan upaya menyekat langkah Taliban (Rahmatullah & Hamidah , 2021).

15 Agustus tahun 2021, Taliban kembali menguasai Afghanistan untuk yang kedua kalinya. Padahal sebelumnya, kesepakatan damai antara Donald Trump dan Taliban yang telah berlangsung beberapa kali pada pada tahun 2020 lalu, membawa dampak perubahan signifikan bagi masa depan Afghanistan dan Timur Tengah, dan kebijakan A.S di kawasan tersebut. Terkait dengan pendudukan Afghanistan untuk yang kedua kalinya oleh Taliban, AS dan sekutunya seperti Australia, Jerman, hingga NATO, menarik

barisan dari kawasan yang kental akan nilai-nilai keislamannya tersebut. Tindakan A.S dan sekutunya, lantas mengisyaratkan kepada publik bahwa negara adikuasa tersebut, mengangkat kakinya dari segala dinamika politik yang terjadi di Afghanistan setelah hampir 20 tahun melancarkan serangan guna meruntuhkan kekuatan Taliban pasca insiden 9/11 (Nainggolan, 2021).

Berbagai pandangan hadir terkait dengan penarikan pasukan A.S di Afghanistan setelah begitu lama membantu mengamankan keamanan disana. Sebagian kalangan berpendapat bahwa Afghanistan, terlalu menggantungkan diri kepada pasukan dan sumber daya AS. Optimisme Pemerintahan Ghani seketika berubah menjadi pesimisme dan sikap pasrah tatkala kembalinya Taliban menguasai beberapa provinsi dan kota besar dimana hal tersebut, membuat Taliban sukses menguasai Afghanistan sepenuhnya. Para akademisi melihat bahwa pendudukan Taliban untuk yang kedua kalinya tersebut, mempunyai implikasi serius pada penguatan konservatisme beragama, kekerasan, dan sikap nophobia di kawasan Timur Tengah. Pastinya, setelah Irak, Libya dan Yaman, Afghanistan akan menjadi wilayah ketidakstabilan baru di Timur Tengah (Nainggolan, 2021).

Merujuk kepada penelitian terdahulu yang telah mengangkat isu mengenai pendudukan Afghanistan oleh kelompok militan islam Taliban tahun 2021, terhitung baru beberapa saja seperti jurnal ilmiah karya Agus Satmoko Adi dan Iman Palsu Marganda Hadiarto Purba dari Universitas Negeri Surabaya tahun 2021 dengan judul *The Victory of Taliban and Its Influence on Jamaah Islamiyah Group in Indonesia*. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif yang menjadikan Jamaah Islamiyah sebagai objek penelitiannya, penelitian tersebut mencoba untuk melihat bagaimana tanggapan kelompok Jamaah Islamiyah terhadap fenomena kependudukan Afghanistan oleh kelompok Taliban tahun 2021. Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa, pengaruh fenomena kependudukan Afghanistan oleh Taliban tahun 2021 tidak cukup berdampak banyak kepada kelompok Jamaah Islamiyah dalam melakukan upaya serupa, meskipun dalam pembentukannya mempunyai keterkaitan langsung dengan kelompok Taliban sekalipun. Beberapa aspek yang dinilai penting menurut penulis dan

turut menjadi latar belakang ketidakmampuan tersebut diantaranya; (i) Beberapa pemimpin mereka sudah ditangkap oleh pihak kepolisian; (ii) Tidak mempunyai persenjataan lengkap serta human resource yang cukup karena banyak anggotanya yang meninggalkan kelompok dan berpindah ke Jamaah Ansharut Tauhid; (iii) Kepemimpinan melemah semenjak Hambali dihukum di Guantanamo dan Para Wijayanto tertangkap; dan terakhir (iv) Instruksi dari pemimpin terakhir yakni Para Wijayanto kepada anggota Jamaah Islamiyah untuk tidak melakukan tindakan terorisme, meskipun beberapa anggota mereka menanggapi fenomena tersebut dengan euphoria (Adi & Purba, 2021).

Meskipun begitu, penelitian tersebut tetap merekomendasikan bahwa kecenderungan pikiran manusia yang tidak statis, memungkinkan kelompok tersebut dapat bertransformasi ke dalam bentuk barunya dengan gaya dan karakteristik kelompok yang lebih agresif daripada pendahulunya. Adapun penelitian lain yang mempunyai beberapa persamaan pembahasan dalam penelitian ini, telah penulis tuangkan dalam tabel yang diantaranya sebagai berikut:

NO	JUDUL	PENULIS	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Pemikiran Politik dan Negara Ibnu Taimiyah: Studi Pendudukan Taliban atas Pemerintahan Afghanistan	Prayudi Rahmatullah, Taufik Hamidah (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)	Membahas mengenai fenomena kependudukan Afghanistan oleh kelompok militan islam Taliban tahun 2021.	Penelitian ini menggunakan pemikiran politik Negara Ibnu Taimiyah mengenai politik dan negara yang berfokus pada kepentingan manusia sebagai makhluk sosiologis dan negara harus mengakomodir kepentingan-kepentingan tersebut.



2	Taliban di Afghanistan: Tinjauan Ideologi, Gerakan, dan Aliansinya dengan ISIS.	Aly Ashghor (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2021)	Menganalisis landasan ideologis dan arah gerak kelompok militan islam Taliban di Afghanistan.	Penelitian tersebut hanya mengulas terkait informasi ideologis, arah gerak, dan keterkaitannya dengan ISIS dan tidak membahas lebih jauh mengenai keterkaitannya dengan kelompok militan islam di Indonesia.
3	<i>Taliban Insurgency and Transnational Organize Crime Nexus</i>	Mohammad Ayub Mirdad (Universitas Airlangga, 2020)	Menganalisis aktivitas politik dan pergerakan kelompok militan Taliban.	Pada jurnal tersebut mencoba untuk melihat lebih jauh mengenai kejahatan terorganisir kelompok Taliban di skala internasional.

5	Taliban Merebut Kembali Kekuasaan di Afghanistan	Portak Partogi Nainggolan (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2021)	Membahas mengenai pendudukan Taliban terhadap Afghanistan serta dampak dari fenomena tersebut.	Pada jurnal tersebut lebih berfokus pada dampak yang timbul dari fenomena pendudukan Afghanistan oleh Taliban dalam dunia internasional.
6	Segitiga Kekerasan, HAM, dan Perempuan Afghanistan dalam Era Kepemimpinan Taliban	Rafika Wahyu Andani, Rania Nabilla Putri, Muhamad Afdhel Darmawan	Membahas aktivitas politik dan pergerakan kelompok Taliban di Afghanistan.	Jurnal ini menggunakan teori segitiga kekerasan dari John Galtung sebagai landasan analisis mereka untuk membagi berbagai jenis kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Taliban, serta mengaitkannya dengan HAM dan kajian perempuan.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang penulis angkat berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena dalam penelitian ini mencoba untuk melakukan analisis komparatif terkait fenomena kependudukan Afghanistan oleh kelompok milisi Taliban untuk yang kedua kalinya tepatnya tahun 2021, mempengaruhi kelompok islam Front Pembela Islam (FPI) dalam melakukan gerakan serupa dengan yang dilakukan oleh milisi Taliban, serta melihat bagaimana dampak yang akan ditimbulkan terhadap keamanan nasional di Indonesia.

Front Pembela Islam (FPI) didirikan dan diproklamirkan di halaman Pondok Pesantren al-Umm, Kampung Utan, Ciputat, Jakarta. Selatan oleh Habib Rizieq. Tokoh bernama lengkap al Habib Mohammad Rizieq bin Husein Syihab ini masih memegang posisi kunci di FPI, tepatnya Ketua Majelis Tanfidzi DPP FPI hingga tahun 2008. Ada tiga alasan utama dibalik pembentukan dan proklamasi Front Pembela Islam (FPI). Pertama, penderitaan berkepanjangan umat Islam di Indonesia masih terlihat akibat lemahnya kontrol sosial dari aparat sipil dan militer akibat berbagai pelanggaran HAM oleh penguasa. Kedua, masih maraknya kejahatan endemik dan pembangkangan yang semakin merajalela di semua lapisan masyarakat. Dan ketiga, diilhami oleh kewajiban menegakkan dan membela harkat dan martabat Islam dan umat Islam. Perkembangan lebih lanjut dari kegiatan Front Pembela Islam (FPI) menunjukkan tingkat ekstremisme tertinggi dibandingkan dengan gerakan Islam radikal lainnya di tanah air.

Pentingnya FPI dijadikan objek penelitian ini karena penulis melihat bahwasannya FPI mempunyai human resources yang besar dalam memobilisasi massa kedalam gerakan-gerakan politik mereka dan mempunyai potensi untuk melakukan gerakan serupa dengan Taliban dalam memperjuangkan syariat Islam. Burhani (2016), memaparkan sedikit banyak mengenai fenomena perkembangan besarnya FPI yang dimulai sejak 2016 silam, dan belakangan hadir sebagai one man show pada kancah perpolitikan negara yang seakan gerakannya mewakili aspirasi umat muslim di Indonesia. Kebesaran FPI sebagaimana Burhani menjelaskan, bahwa FPI menjadi besar karena momentum Aksi Bela Islam I, II, dan III, yang

berlangsung 3 bulan (Oktober, November, dan Desember) 2016 silam di lapangan Monumen Nasional.

Sebelum Aksi Bela Islam, FPI kerap diidentikan dengan ormas yang keras dan intimidatif kepada kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang dari ketentuan agama Islam (Akhrani, 2018). Tidak jarang pula, FPI kerap menyidak dan membubarkan tempat-tempat hiburan di Jakarta yang menurut mereka adalah jantung dari perbuatan zalim dan melenceng dari nilai-nilai keislaman. Namun, pasca Aksi Bela Islam I, II, dan III, 2016 silam, FPI berhasil memutar balik persepsi masyarakat dari kekerasan menjadi juru selamat Islam (Minan & Rizki, 2019). Aksi keagamaan melawan penistaan agama karena pidato Basuki Tjahaja Purnama yang viral di media sosial terkait Surat Al-Maidah Ayat 51, segera menjadi fenomena dan isu politik yang tidak terelakkan tatkala pada Aksi Bela Islam secara berturut tersebut, eksis menjelang Pilkada DKI Jakarta, serta terdapat beberapa unsur yang dibawa pada aksi tersebut seperti isu kepemimpinan non-muslim China, penggusuran daerah kumuh, reklamasi, dan marginalisasi kelompok (Burhani, 2016). Memang pada awalnya Aksi Bela Islam I yang dipimpin oleh Rizieq Shihab, Arifin Ilham, Zaitun Nasir, dan lain sebagainya hanya diikuti oleh puluhan ribu orang dan identik dengan gerakan solo FPI yang mendapat dukungan dari beberapa kelompok Islam Konservatif dan Radikal, namun pada Aksi Bela Islam II dan III hal yang terjadi justru di luar ekspektasi.

Aksi Bela Islam II dihadiri oleh sekitar satu juta orang yang berkumpul di Bundaran HI, dengan melibatkan elemen kelompok Islam yang lebih luas seperti Muhammadiyah, walaupun Pimpinan Muhammadiyah menyatakan secara kelembagaan tidak ikut dalam aksi tersebut, namun menghimbau kepada warga Muhammadiyah yang ingin ikut aksi tidak menggunakan atribut Muhammadiyah. Amien Rais juga segera memeriorahkan argumentasi politik yang terjadi tatkala beliau menyatakan bahwa gerakan Aksi Bela Islam II adalah kebangkitan umat Islam dan momentum yang diberikan Allah kepada umat Islam untuk mengalahkan Ahok dalam Pilkada (Burhani, 2016).

FPI yang dipimpin oleh Rizieq Shihab segera menampilkan sosok one man show tatkala Aksi Bela Islam III yang digelar pada 2 Desember 2016 dimana

Rizieq Shihab menjadi Imam sholat Jum'at di Monumen Nasional (Monas). Tidak ada yang aneh ketika kita berbicara mengenai Rizieq Shihab yang menjadi Imam Sholat Jumat saat itu, namun menjadi persoalan lain ketika Jokowi datang menghadiri Sholat Jumat yang dipimpin oleh Imam Besar FPI tersebut. Kedatangan Jokowi mendengarkan khutbah dan ikut melaksanakan Sholat Jumat tersebut seakan menjadi legitimasi bagi gerakan 212 dan cenderung memberikan pengaruh yang lebih besar kepada FPI dan Rizieq Shihab terkait gerakan keagamaan (Burhani, 2016). Selain Jokowi, beberapa pejabat penting lain juga hadir seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Agama Lukman Hakim, Menteri Polhukam Wiranto, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Tito Karnavian, dan berbagai pejabat negara lainnya. Muhammad Rizky Harahap dalam jurnal penelitiannya dengan gamblang menyebutkan bahwa sosok Rizieq Shihab, merupakan salah satu figur sentral dalam mobilisasi massa terbesar di Indonesia, pasca jatuhnya rezim Orde Baru tahun 1998 (Harahap, 2020).

Selain human resources, keberadaan FPI di tengah-tengah kancah perpolitikan di Indonesia juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Harahap (2020), dengan menyitir penelitian terdahulu memaparkan bahwa setidaknya ada beberapa pengaruh FPI dalam perpolitikan di Indonesia. Misalnya dalam penelitian Fealy (2020) dijelaskan bahwa FPI adalah motor dari keluarnya Fatwa MUI terkait dengan pidato Ahok terkait Surat Al- Maidah Ayat 51, dan FPI berhasil menjadi jembatan antara MUI sebagai elit politik dengan masyarakat akar rumput. Selain sebagai penghubung, disinyalir FPI juga menjadi wadah bagi golongan umat islam konservatif untuk bergerak dalam perpolitikan nasional. Mietzner dan Muhtadi (2018) jua menjelaskan bahwa terdapat korelasi antara gerakan 212 dengan sistem partai yang berubah-ubah pasca reformasi dimana hal tersebut berdampak pada signifikansi dukungan suara dari umat Islam konservatif di Indonesia kepada organisasi Islam garis keras seperti FPI, karena partai-partai keislaman di Indonesia semakin moderat dan tidak dapat mengakomodasi kepentingan umat islam konservatif (Burhani, 2016). Dengan menyoroti hal tersebut, komparasi antara Taliban dan FPI menjadi tidak terelakkan, mengingat Taliban yang juga dulunya

hanya identik dengan pergerakan menegakan syariat Islam, berubah menjadi gerakan politik Islam setelah mendapatkan kekuasaannya di tanah Afghanistan.

Selain itu, terlihat pula sedikit persamaan terkait bagaimana FPI memperjuangkan penegakan ajaran dan nilai-nilai keislaman di Indonesia dengan bagaimana Taliban memperjuangkan terimplementasinya nilai-nilai keislaman di Afghanistan. Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center, Ken Setiawan mengatakan bahwa terdapat kesamaan pergerakan yang diterapkan antara FPI dan Taliban, yakni sama-sama menggunakan agama Islam sebagai bahan politisasi.

Padahal secara latar belakang ideologis, FPI dan Taliban mempunyai ideologi yang baik, yaitu ahlussunnah wal jamaah. Namun, dirinya menegaskan bahwa banyak latar belakang keislaman organisasi teroris di Indonesia mempunyai latar belakang salafi wahabi seperti HTI dan Ikhwanul Muslimin. Bila para pemimpin organisasi keislaman lain di Indonesia terkontaminasi dengan paham tersebut, maka sangatlah berbahaya, karena paham tersebut menyandarkan diri kepada rasa kekecewaan terhadap kondisi pemerintah saat ini, dan salah satu cara terlepas dari kondisi tersebut adalah negara harus menggunakan hukum serta syariat islam untuk membenahinya. Terakhir, Ken menambahkan, FPI dan Taliban sama-sama selalu menggelorakan penegakan Islam secara kaffah (sempurna). Mereka bercita-cita menjadikan negara makmur dinaungi satu pemimpin atau khalifah yang amanah dari kelompok mereka. Walaupun faktanya di lapangan sering didapati antara tujuan dan realitas sangat berbeda dan bahwa kesamaan lain antara FPI dan Taliban adalah mereka sama-sama sering melakukan sweeping, bedanya hanyalah Taliban menggunakan senjata api sedangkan FPI menggunakan demonstrasi dan pentungan (JPNN, 2021).

Berdasarkan catatan Wahid Institute (WI) Jakarta, eksklusivisme dan radikalisme FPI memiliki varian manifest yang sangat beragam, mulai penutupan tempat ibadah hingga penggunaan cara-cara kekerasan terutama dalam razia tempat-tempat Hiburan yang menjadi jantungnya kejahatan, Beberapa contohnya adalah seperti Ratusan massa yang tergabung dalam

Front Pembela Islam (FPI) berunjuk rasa di gedung DPR/MPR. Mereka menuntut DPR/MPR untuk mengembalikan Pancasila sesuai Piagam Jakarta, penuntutan ini bertujuan agar sila pertama menurut piagam Jakarta Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya kembali dipakai dan menggantikan sila pertama saat ini yang berbunyi ketuhanan yang maha esa dan hal ini secara tidak langsung FPI ingin menjadikan Islam sebagai salah satu landasan Hukum Negara dan tindakan selanjutnya adalah Dewan Pimpinan Wilayah FPI Kabupaten Purwakarta Jawa Barat menekan kepada pengelola taman kanak-kanak Tunas Pertiwi di Jalan Bangunsari menghentikan kebaktian sekaligus membongkar bangunannya. Jika tidak, FPI mengancam akan menghentikan dan membongkarnya, hal ini secara tidak langsung FPI membatasi Hak Masyarakat dalam melakukan Aktivitas agama. Tindakan FPI tersebut menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat, seperti kecemasan, ketakutan, penolakan, persetujuan, bahkan kebanggaan atas pendirian FPI yang tegas. Meskipun kelompok FPI (Front Pembela Islam) telah dibubarkan oleh Pemerintah Indonesia secara kelembagaan pada Juni 2019 silam, mereka bertransformasi dengan mengubah logo dan namanya menjadi Front Pembela Islam (FPI), dan struktur anggotanya pun kurang lebih masih terdapat banyak kesamaan dengan FPI lama (CNN Indonesia, 2021).

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo, enggan berkomentar banyak mengenai mereka yang melakukan tindakan terorisme pada akhirnya dikeluarkan oleh FPI. Sugeng mengatakan, pemerintah mengambil pertimbangan berdasarkan data dari lembaga yang menangani tindak pidana terorisme, seperti BNPT maupun Densus 88. Termasuk dalam data tersebut ialah berita acara dari interogasi para terduga teroris yang mengatakan bahwa mereka anggota FPI. Adapun Tokoh Bangsa lainnya yang berpendapat terkait Radikalisme FPI ialah Razikin, Ketua PP Bidang Hukum dan Ham PP MUHAMMADIYAH menuturkan bahwasannya langkah pemerintah yang secara resmi membubarkan organisasi masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam (FPI) diyakini sudah melalui kajian yang komprehensif. Secara hukum sebetulnya

dengan dicabutnya legal standing FPI dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tertanggal 23 Desember tahun 2014 maka eksistensi FPI sebagai sebuah organisasi sudah tidak ada. Razikin pun memandang, langkah pemerintah yang melarang seluruh aktivitas FPI merupakan langkah yang tepat. Karena dia melihat, ormas yang didirikan Habib Rizieq Shihab tersebut, semakin memperlihatkan berbagai tindakan yang melanggar hukum melihat FPI sendiri menumpang dalam fasilitas demokrasi dengan menabrakan prinsip-prinsip dasar dari demokrasi itu sendiri. Razikin menilai ada hal yang jauh lebih penting dari sekadar polemik pembubaran tersebut, yang dianggapnya perlu pencermatan semua pihak, yakni, belakangan ini ada gejala menguatnya radikalisme dan ekstremisme. Radikalisme yang dimaksud disini adalah bahwasannya FPI menggunakan Radikalisme Agama, Ditambahkan Ken, FPI dan Taliban sama sama-sama selalu menggelorakan penegakan Islam secara kaffah (sempurna). Mereka bercita-cita menjadikan negara makmur dinaungi satu pemimpin atau khalifah yang amanah dari kelompok mereka. Walaupun faktanya di lapangan sering didapati antara tujuan dan realitas sangat berbeda.

Eksistensi FPI telah membuat bangsa ini terkotak-kotak dan bisa berujung pada disintegrasi. Jika dibiarkan akan seperti Taliban di Afganistan. Menggunakan senjata untuk merebut kekuasaan dan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Bila Taliban ikut mendukung jaringan terorisme Al Qaeda, sedangkan 37 anggota FPI terafiliasi dalam jaringan terorisme. Dari beberapa pihak diatas yang berbicara terkait FPI bisa kita pahami bersama, Bahwasannya FPI sejatinya telah melanggar beberapa peraturan undang-undang Negara yang kebanyakan didasari tindakan kekerasan disertai pola pikir Radikalisme yang perlahan tumbuh dari Beberapa Anggota FPI yang ikut serta dalam beberapa tindakan Terorisme di Indonesia. Berhubungan dengan hal tersebut, penulis mencoba untuk melihat kemungkinan FPI yang baru tersebut dapat menjadi denominator pergerakan Islam militan untuk mengimplementasikan bentuk negara islam di Indonesia yang tentu saja dapat mengancam keamanan nasional, mengingat pembubaran yang dilakukan negara terhadap organisasi tersebut.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis tuangkan didalam bagian sebelumnya, adapun rumusan masalah yang penulis angkat guna menjadikan pembahasan dalam penelitian ini menjadi lebih komprehensif dan terarah. Rumusan masalah yang penulis angkat yaitu; Apakah terdapat persamaan pemikiran politik Islam yang menjadi landasan gerak antara kelompok Taliban dengan kelompok Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia yang dapat mengganggu keamanan nasional?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendudukan Afghanistan untuk yang kedua kalinya oleh kelompok Taliban tahun 2021 pada masa pemerintahan Presiden Ashraf Ghani, turut mempengaruhi kelompok militan islam Front Persaudaraan Islam (FPI) di Indonesia untuk mengadopsi pemikiran politik serupa, serta mengaktualisasikan negara islam di Indonesia berhubung juru bicara Taliban, Zabiullah Mujahid mengatakan bahwa Taliban saat ini akan menghormati segala bentuk hak asasi manusia serta hak dan pemberdayaan perempuan. Sehubungan dengan hal itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana fenomena kependudukan Afghanistan oleh kelompok Taliban tahun 2021 ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keamanan nasional di Indonesia.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan dan wawasan pembaca karena penelitian ini disertai dengan teori, data-data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan, serta analisis yang mendalam terhadap fenomena kependudukan Afghanistan oleh kelompok Taliban di masa pemerintahan Presiden Ashraf Ghani tahun 2021.

## **b. Manfaat Praktis**

### **1. Bagi Masyarakat Umum**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pemahaman lebih lanjut dalam menanggapi fenomena kependudukan Afghanistan oleh kelompok Taliban tahun 2021, serta dapat menjadi acuan bersikap guna menghindarkan diri dari segala bentuk aktivitas-aktivitas yang dapat mengganggu keamanan nasional di Indonesia.

### **2. Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian ilmiah bagi sesama akademisi yang mempunyai kesamaan studi dengan penulis maupun peneliti yang mempunyai latar belakang fokus keilmuan yang berbeda dalam membentuk sebuah penelitian yang menyangkut fenomena kelompok militan islam Taliban, Afghanistan, maupun kelompok militan islam di Indonesia seperti Front Persaudaraan Islam (FPI).

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang sesuai dengan struktur penulisan tugas akhir skripsi dimana penulis membagi beberapa sub-bab dengan tujuan untuk mempermudah pembaca memahami topik yang akan diangkat penulis di dalam penelitian ini. Adapun beberapa bab yang akan penulis tuangkan dalam penelitian ini, diantaranya seperti berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berusaha untuk menjelaskan berbagai bagian yang berguna sebagai pengantar pembaca terhadap permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Adapun beberapa bagian tersebut seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hingga sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu berisi konsep dan teori penelitian, serta kerangka pemikiran. Konsep dan teori penelitian yang dimaksud di dalam bagian ini bertujuan sebagai landasan analisis penulis terhadap permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran adalah alur berpikir penelitian mulai dari rumusan masalah hingga menemukan jawaban atas penelitian yang dibentuk penulis.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini, peneliti menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan untuk menemukan hasil penelitian, serta menganalisa permasalahan yang akan diteliti. Peneliti juga mencantumkan objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, serta tabel rencana waktu penelitian.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang temuan-temuan data penelitian yang dianalisis menggunakan teori-teori tertentu agar mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang disampaikan pada bab pendahuluan. Peneliti akan mencoba menganalisis keterkaitan fenomena kependudukan Afghanistan oleh kelompok militan Islam Taliban terhadap tanggapan FPI mengenai konsep Negara Islam yang diimplementasikan Taliban sebagai gaya pemerintahan mereka di wilayah Afghanistan tahun 2021. Dalam bab ini pula, penulis mencoba untuk membahas mengenai kemungkinan dampak kaitan kedua hal tersebut dengan keamanan nasional di Indonesia.

## **BAB V PENUTUP**

Sebagai bagian akhir dari penelitian, pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dimana memuat argumentasi reflektif penulis terhadap hasil penelitian akhir yang telah dibentuk. Dalam bagian ini pula, penulis menuangkan saran atau

rekomendasi terhadap pembaca yang dapat berguna bagi penulis dan penelitian ini, maupun bagi para pembaca.